

Nganjuk District Regional Government's Strategy in Maintaining Unqualified Opinion

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Mempertahankan Opini WTP

Andy Chandra Pramana^{*1}, Krissantina Eferyn², Nonni Yap³, Linda Karlia⁴, Lusy Siswandari⁵

Universitas Kediri^{1,2,3,4,5}

andychandra@unik-kediri.ac.id

**Corresponding Author*

ABSTRACT

Unqualified Opinion (WTP) is an opinion given by the Financial Audit Agency (BPK) which is presented in the Regional Government Financial Report (LKPD). The aim of this research is to find out the strategy of the Nganjuk Regency Regional Government in maintaining the WTP Opinion, and to find out the obstacles faced by the Nganjuk Regency Regional Government in maintaining the WTP Opinion. In this research, the researcher took a type of descriptive research with a qualitative approach. The results of the research show that the strategy highlighted by the Nganjuk Regency Regional Government is the agenda of signing a commitment between the OPD Leaders and the Regent to agree on the date for submitting financial reports for each OPD. Another strategy that is no less important is studying the Financial Report Audit process in previous years as well as the review process from the Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The success of obtaining a WTP Opinion is also influenced by a reliable Accounting Information System, competent Human Resources (HR), and adequate infrastructure. Suggestions that can be given to future researchers are to look for unique strategies from other districts/cities that have succeeded in maintaining an Opinion. WTP from the BPK for more than 6 times in a row so that this strategy is considered more patent and can be applied in other districts/cities that need a strategy to obtain or maintain a WTP Opinion from the BPK.

Keyword: Local Government, Audit Opinion, Strategy

ABSTRAK

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tersaji dalam dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan Opini WTP, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan Opini WTP. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang ditonjolkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk adalah dengan adanya agenda penandatanganan komitmen antara Pimpinan OPD dan Bupati untuk menyepakati tanggal penyerahan laporan keuangan tiap-tiap OPD. Strategi lain yang tidak kalah penting ialah mempelajari proses Pemeriksaan Laporan Keuangan pada tahun-tahun sebelumnya serta adanya proses *review* dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Keberhasilan memperoleh Opini WTP juga dipengaruhi oleh Sistem Informasi Akuntansi yang handal, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, serta sarana prasarana yang memadai. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah dengan mencari keunikan strategi dari Kabupaten/Kota lain yang telah berhasil mempertahankan Opini WTP dari BPK selama lebih dari 6x berturut-turut sehingga strategi tersebut dirasa lebih paten dan dapat diterapkan pada Kabupaten/Kota lainnya yang membutuhkan strategi untuk mendapatkan atau mempertahankan Opini WTP dari BPK.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Opini Audit, Strategi

1. Pendahuluan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mewajibkan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud keterbukaan pengelolaan keuangan negara yang berada di Tingkat Daerah. Pelaporan tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas Pemeriksaan tersebut, BPK akan memberikan opini. Opini yang dapat diberikan oleh BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Urutan tersebut merepresentasikan urutan kualitas dari sebuah LKPD (Jati, 2019).

Kabupaten Nganjuk merupakan Pemerintah Daerah yang mendapatkan Opini WTP 6 kali secara berturut-turut, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Hal ini menarik untuk diteliti bagaimanakah kiat-kiat Pemerintah Daerah kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan Opini WTP dan apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya mempertahankan Opini WTP tersebut.

(Sukandani & Istikhoroh, 2023) menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan WTP adalah dengan menerapkan akuntansi yang konservatif, artinya ketika melaksanakan kegiatan akuntansi harus selalu sesuai dengan standar dan bebas dari salah saji, dengan begitu maka Opini WTP tidak sulit untuk didapatkan.

(Hasiara et al., 2019) menyatakan bahwa opini WTP hanya dapat diperoleh apabila pegawai Pemerintah Kota patuh terhadap kebijakan audit atau pemeriksaan. Jika pemerintah daerah tetap melakukan audit atas keuangannya, maka tindakan koruptif akan terminimalisir, sehingga kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat di daerah tersebut dapat ditingkatkan.

2. Tinjauan Pustaka

Grand Theory

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *Stewardship theory* yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Naryanto et al., 2020).

Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals (pemberi mandat) dan manajemen (penerima mandat). Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. *Stewardship theory* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi dan non profit lainnya yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals (Wilson, 2016).

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan (audit) keuangan negara menurut UU No. 15 tahun 2004 adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, serta profesional yang dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditentukan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Rahmadani, 2018). Proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada penggunaan laporan keuangan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan terpercaya. Lembaga negara yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan (audit) keuangan negara menurut UU No. 15 tahun 2004 adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, serta profesional yang dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditentukan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Rahmadani, 2018).

Hasil pemeriksaan keuangan memberikan informasi mengenai adanya potensi kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD. Hasil audit BPK tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi audit investigasi dan kasus korupsi serta kasus pidana. Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan Negara di Tingkat Daerah tentu akan menghindari hal tersebut dan mengupayakan agar hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan mereka adalah WTP, dengan demikian mereka akan terbebas dari masalah hukum, serta untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mengelola uang Negara dengan wajar dan sesuai standar.

Strategi Pemerintah Daerah

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dengan melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Strategi dapat dirancang dengan mengidentifikasi regulasi sebagai tujuan yang ingin dicapai dan mengidentifikasi kondisi saat ini. Apabila terjadi gap antara regulasi dan kondisi, maka strategi dapat dirancang ke langkah-langkah yang akan dilakukan. Strategi yang dikemukakan oleh tidak hanya penyusunan rencana aksi, akan tetapi disusunnya aspek-aspek pendukung lainnya (Naryanto et al., 2020).

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah, yang dapat diartikan sebagai berikut: Melakukan pekerjaan menyuruh/perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu; Badan yang melakukan kekuasaan memerintah/ kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan negara tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet termasuk pemerintahan); Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, yang kemudian mendapat imbuhan awalan “pe” menjadi kata pemerintah yang berarti badan yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu Negara atau badan yang menjalankan pemerintahan (Kurniati & Suryanto, 2020).

Strategi yang dibahas dalam penelitian ini adalah strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan opini WTP, adapun 9 strategi dalam memperoleh opini WTP yaitu: komitmen pimpinan, membentuk tim, membuat rencana aksi, menyiapkan anggaran, rancangan sistem pengendalian internal, perbaikan sistem akuntansi keuangan serta sistem informasi manajemen barang daerah, peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi peran APIP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi (Kurniati & Suryanto, 2020).

Opini WTP

Pemberian opini kepada pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi, maka penilaian opini yang diperoleh pemerintah daerah semakin tinggi. Adapun kriteria pemberian opini pemerintah daerah sebagai berikut (Rahmadani, 2018):

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Keempat kriteria pemeriksaan di atas akan berdampak terhadap opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau

ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikanpun akan semakin buruk. Pelanggaran yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.

Secara umum terdapat 4 jenis opini audit BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para *stakeholder* atau publik/masyarakat (Jati, 2019). Dengan memperoleh opini WTP, tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemda akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.

3. Metode Penelitian

Jenis, Informan dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah riset atau penelitian yang bersifat analisis dan berdasarkan dari fakta dan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji (Moleong, 2007).

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Auditor Muda Inspektorat Daerah.

Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data penjabaran strategi yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan opini WTP. Data sekundernya adalah dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk gunakan di lapangan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013) yaitu Observasi (Pengamatan Langsung), Wawancara (*Interview*), dan Studi Pustaka dan Dokumen.

Metode dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan analisis kualitatif. Setelah data-data terkumpul, penulis membuat suatu analisis dari data-data yang telah penulis dapatkan dari penelitian dan akan diolah. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta hasil studi lapangan atau studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian (Moleong, 2019).

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam melaksanakan fungsi pelaporan keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk diwakili oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau dengan kata lain BPKAD memiliki tugas pokok dan fungsi melaporkan LKPD Kabupaten Nganjuk. Di dalam BPKAD terdapat beberapa bidang, diantaranya: Sekretariat, Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Akuntansi dan Pelaporan. Perihal pelaporan LKPD berada dibawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Proses dan tahapan membuat LKPD adalah bagian Akuntansi dan Pelaporan menghimpun laporan dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk memiliki 52 OPD. BPKAD memiliki agenda rutin dalam pelaporan LKPD. Pertama, BPKAD memiliki agenda penandatanganan komitmen penyelesaian Laporan Keuangan tiap-tiap OPD sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan seluruh OPD dengan Bupati Nganjuk. Penandatanganan Komitmen ini menjadi penting karena sebagai bentuk komitmen dari Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam proses penyelesaian LKPD. Sementara itu Pimpinan tiap-tiap OPD juga diminta untuk berkomitmen agar dapat menyelesaikan laporan keuangan OPD masing-masing secara tepat waktu. Dengan demikian, agenda Pertama ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Nganjuk demi memperoleh atau mempertahankan Opini WTP dari BPK. Dengan penyerahan Laporan Keuangan OPD yang tepat waktu, Bagian Akuntansi dan Pelaporan di BPKAD Kabupaten Nganjuk dapat melakukan pengecekan, mengkompilasi Laporan Keuangan hingga menyusun LKPD dengan cermat atau tidak terburu dengan waktu, sehingga pekerjaan final yang diserahkan kepada BPK adalah pekerjaan yang benar-benar final dan sudah melalui beberapa kali proses pengecekan yang dilakukan bersama dengan pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Agenda kedua adalah pendampingan OPD, maksud dari agenda ini adalah ketika OPD menyerahkan Laporan Keuangan, Bagian Akuntansi dan Pelaporan membagi staf nya untuk melakukan pendampingan terhadap OPD, sehingga angka-angka pada Laporan Keuangan OPD yang diserahkan akan dicek terlebih dahulu pada saat pendampingan tersebut. Tidak lupa, pada saat proses ini Bagian Akuntansi dan Pelaporan juga melakukan koordinasi terkait angka aset kepada Bagian BMD untuk memastikan kebenaran angka aset yang terdapat pada Laporan Keuangan tiap OPD. Dalam tahap ini strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pendampingan OPD, tentunya dalam pemetaan sumber daya manusia terdapat perbedaan kemampuan pada masing-masing sumber daya manusia. BPKAD Kabupaten Nganjuk menyiapkan sumber daya yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik untuk mendampingi OPD yang memiliki kompleksitas tinggi seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir molornya waktu terselesaikannya laporan keuangan di tingkat OPD.

Tahap selanjutnya adalah ketika LKPD Kabupaten sudah selesai disusun, Bagian Akuntansi dan Pelaporan BPKAD melakukan telaah bersama-sama dengan Inspektorat Kabupaten Nganjuk, guna menyempurnakan LKPD yang telah disusun.

Dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mengatakan bahwa masih ada pekerjaan setelah reviu dari Inspektorat, yaitu revisi, biasanya dari Inspektorat masih ada revisi, terkadang juga ada jurnal tambahan atau susulan dari OPD. Auditor Muda Inspektorat Daerah mengatakan bahwa pada tahap reviu di Inspektorat selain melakukan pengecekan LKPD, di Inspektorat juga menggali kekurangan dengan cara melakukan koordinasi dengan seluruh OPD untuk menanyakan apakah ada jurnal tambahan yang belum dilakukan penjurnalan saat pendampingan dengan Bagian Akuntansi dan Pelaporan BPKAD. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah jurnal penyesuaian yang kemungkinan akan ditemukan oleh BPK saat terjadi pemeriksaan. Mengingat penjadwalan dari BPKAD sangat ketat terkait pendampingan dan penyerahan laporan keuangan dari OPD maka masih banyak sekali jurnal-jurnal yang belum tercatat sehingga kami di Inspektorat berperan untuk menutup kekurangan tersebut. Setelah reviu dari Inspektorat selesai, kemudian BPKAD melakukan finalisasi LKPD yang kemudian dimintakan persetujuan kepada Bupati Nganjuk. Setelah disetujui oleh Bupati Nganjuk maka tahap berikutnya adalah penyerahan LKPD kepada BPK untuk dilakukan Pemeriksaan.

Dari uraian tahapan di atas terdapat satu tahapan yang mungkin dipandang sepele, tetapi mungkin dapat menimbulkan efek yang besar. Tahapan tersebut adalah agenda

penandatanganan komitmen penyelesaian Laporan Keuangan tiap-tiap OPD. Menurut Sekretaris Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah, agenda penandatanganan komitmen ini sepertinya hanya dilakukan di Kabupaten Nganjuk saja, apabila dilihat dari tahapan-tahapan yang lain, mungkin di Kabupaten lain juga sama-sama dilakukan, tetapi untuk agenda penandatanganan komitmen penyelesaian Laporan Keuangan tiap-tiap OPD, sepertinya ini yang merupakan jurus terjitu yang dijadikan sebagai sebuah strategi yang diterapkan oleh Kabupaten Nganjuk dalam mempertahankan Opini WTP.

Menurut Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, strategi yang dilakukan adalah dengan mempelajari dengan sungguh-sungguh bagaimana kemauan Pemeriksa pada tahun-tahun sebelumnya, mendokumentasikan proses dan mempelajari proses Pemeriksaan oleh BPK pada tahun-tahun sebelumnya. "Kami pelajari betul apa yang do and don't sehingga kami hafal ritme Pemeriksaan dari BPK, selain itu juga kami kondisikan agar OPD-OPD itu bisa bekerja sama, karena kan kami ambil data dari mereka, laporan keuangan kami itu dari laporan keuangan mereka, kalau mereka tidak support ya kami juga yang repot karena kalau pengumpulannya molor, kami tidak bisa menyiapkan hal lainnya yang tidak kalah pentingnya, itu kuncinya".

Menurut Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, "Kita belajar dari tahun-tahun yang lalu, pengerjaan laporan keuangan di tingkat OPD itu kalau tidak dibatasi waktunya, OPD itu merasa bahwa mereka dapat menunda pengumpulan laporan keuangan sehingga pekerjaan tersebut tidak menjadi prioritas. Padahal dari sisi kami, kami baru bisa bekerja dengan maksimal apabila laporan keuangan dari OPD-OPD sudah terkumpul semua, maka dari itu kita buat penandatanganan komitmen antara Pimpinan OPD dan Bupati agar mereka segera menyelesaikan dan tahu batas waktunya kapan harus dikumpulkan".

5. Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah strategi yang ditonjolkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk adalah adanya agenda penandatanganan komitmen antara Pimpinan OPD dan Bupati untuk menyepakati tanggal penyerahan laporan keuangan tiap-tiap OPD. Dengan begitu, Bagian Akuntansi dan Pelaporan di BPKAD Nganjuk dapat dengan leluasa mempersiapkan penyusunan LKPD serta agenda Pemeriksaan dari BPK.

Adapun strategi lain yang tidak kalah penting ialah mempelajari proses Pemeriksaan Laporan Keuangan pada tahun-tahun sebelumnya serta adanya proses reviu dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Disamping itu Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga seperti Kabupaten atau Kota lainnya yang keberhasilan memperoleh Opini WTP dipengaruhi oleh Sistem Informasi Akuntansi yang handal, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, serta sarana prasarana yang memadai.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk Peneliti selanjutnya adalah dengan mencari keunikan strategi dari Kabupaten/Kota lain yang telah berhasil mempertahankan Opini WTP dari BPK selama lebih dari 6x berturut-turut sehingga strategi tersebut dirasa lebih paten dan dapat diterapkan pada Kabupaten/Kota lainnya yang membutuhkan strategi untuk mendapatkan atau mempertahankan Opini WTP dari BPK.

Daftar Pustaka

- Hasiara, L. O., Sudarlan, & Diah, A. M. (2019). The factors influencing the sustainability of unqualified opinion (UQU) in the government organizations of East Kalimantan province-Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 2181–2188.
- Indriantoro, N. (2019). *Metode Penelitian Bisnis untuk akuntansi dan Mnajamen*. Andi.

- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145>
- Kurniati, P. S., & Suryanto. (2020). Achievements Strategy for Unqualified Opinion in Bandung Government. *Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science, and Humanities – Economics, Business and Management Track (ICOBEST-EBM 2019)*, 112, 224–227. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200108.051>
- Mbandlwa, Z. (2022). The investigation of the disparities between unqualified audit opinion and effective public service delivery. June. <https://surveyheart.com/form/5e5d59a62e417841d9710612Viewproject>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Moleong, L. J. (2019). *Moleong. Metode Penelitian Kualitatif*.
- Naryanto, Mahroza, J., & Mariadi, M. (2020). Strategic Planning Mempertahankan Opini Wtp Bpk Ri Menuju Good Governance Di Tni Ad. *Strategi Pertahanan Darat*, 6(2), 1–25.
- Rahmadani, K. I. (2018). STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Salatiga). *Jurnal Universitas Brawijaya*, 1(69), 5–24.
- Saleh, I., & Rahadian, Y. (2020). The Root Issues of Not Achieving an Unqualified Opinion : The Case Study in Local Governments XX of Indonesia. 15276–15287.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & sons.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sukandani, Y., & Istikhoroh, S. (2023). (WTP) THROUGH ACCOUNTING CONSERVATISM. 2023(2003), 195–206.
- Wilson, B. K. R. (2016). *Book Review : Steward Leadership in the Nonpro fi t Organization*. 2016.